



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANYUWANGI HIJAU

PERIODE: Mei-Juni 2022

PENGANTAR

Program Banyuwangi Hijau (BWH) adalah inisiatif pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggabungkan model pengelolaan sampah perkotaan dalam pengelolaan sampah sirkular dengan menyediakan solusi daur ulang yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah. BWH mendorong keterlibatan multi-pihak untuk meningkatkan penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi didukung partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana misi Program Banyuwangi Rebound.

Secara umum, tujuan BWH adalah meningkatkan cakupan layanan persampahan yang berkelanjutan, dan memenuhi prinsip *cost recovery*, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting, melalui kemitraan multi-pihak. Dimana hal ini bisa dicapai dengan lima tujuan program, yakni:

- Memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan mengembangkannya menjadi UPTD – Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Persampahan.
- Mendorong praktik perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada masyarakat.
- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang memberikan keuntungan ekonomi.
- Mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi keterlibatan swasta dalam investasi dan pengoperasian sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Menguji coba skema inovasi pendanaan untuk persampahan.

BWH diselenggarakan pada periode 2022-2024 dengan menerapkan integrasi komponen program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target JAKSTRANAS Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tahun 2025, yakni peningkatan penanganan sampah hingga 70% dan pengurangan timbulan sampah hingga 30%. Komponen program adalah Tata Kelola dan Kelembagaan, Sistem Operasional Persampahan, Komunikasi Perubahan Perilaku, dan Inovasi Pendanaan.

1

MANAJEMEN PROGRAM

Periode pelaporan Mei-Juni menunjukkan dinamika pelaksanaan kegiatan yang semakin aktif, dimana keluaran kegiatan bisa diselenggarakan dengan baik namun tantangan-tantangan juga bermunculan. Semua kegiatan BWH diselenggarakan bersama dengan unsur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga seluruh upaya menghadapi tantangan tersebut dilakukan bersama.

Perubahan pada kebijakan pengelolaan keuangan nasional dan daerah yang dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri membuat perubahan Perda Tarif Jasa Umum yang telah diproses sejak 2021 tidak bisa segera diaplikasikan. Sementara proses perijinan pembangunan TPST yang dimulai pasca rampungnya DED TPST Balak juga membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, mengingat dokumentasi perijinan membutuhkan dokumentasi yang sesuai dengan regulasi. Kedua hal ini terus dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk bersama dicapai solusi terbaik agar proses bisa berjalan hingga TPST dibangun dan tarif baru bisa diaplikasikan sesuai waktu yang direncanakan.

Sambil menunggu proses perijinan, pembersihan lahan direncanakan akan dilakukan, sehingga saat ijin membangun diperoleh konstruksi bisa segera dilakukan. Sosialisasi pada masyarakat akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan tersebut berjalan. Sementara pemantapan desain pelayanan sampah bagi masyarakat terus dilakukan dengan memahami lebih baik tentang tipografi lokasi pelayanan, kondisi pelayanan sampah yang sudah ada berikut tarifnya.

Di saat yang sama, studi formatif untuk memahami pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di lokasi BWH. Studi dilakukan selama dua minggu dan diikuti dengan proses analisa. Hasil temuan studi akan menjadi masukan dalam finalisasi strategi kampanye komunikasi perubahan perilaku. Namun, proses analisa membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga finalisasi strategi pun akan perlu disesuaikan waktunya.

Tim BWH telah memulai berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Tembokrejo untuk rancangan PKS pelaksanaan *plastic credit*. Dimana dimungkinkan akan ada perubahan naskah untuk menampung masukan dari para pihak terkait. Sementara itu proses pendaftaran Verra untuk Project STOP tetap dilakukan dengan terus mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.

1.1 Keluaran Program BWH

Pada periode Mei-Juni ini, tim empat komponen program bersama para mitranya dari unsur Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan para pemangku kepentingan melanjutkan berbagai proses penyiapan pelaksanaan pelayanan sampah yang akan mulai dilaksanakan pada akhir 2022. Berikut adalah hasil kegiatan BWH selama periode pelaporan ini:

- PKS BWH ditandatangani oleh Sekda Kab. Banyuwangi dan Direktur Program Banyuwangi Hijau, dan penyiapan proses penganggaran operasional persampahan untuk APBD 2023 dimulai. Proses perijinan pembangunan TPST pun dimulai, namun karena ada beberapa aspek regulasi terkait proses perijinan yang perlu koordinasi lebih lanjut, maka proses ini membutuhkan waktu lebih lama dari rencana. Sementara itu persetujuan pemberlakuan Perbup Juklak revisi Perda Restribusi Jasa Umum tertahan karena perubahan peraturan Kemendagri. Hal ini menyebabkan diperlukannya peraturan baru khusus tarif jasa sampah agar bisa mendukung pelayanan sampah yang rencananya dimulai akhir tahun 2022.
- Kontraktor untuk konstruksi TPST telah dipilih, dan sambil menunggu proses perijinan yang sedang berjalan, persiapan konstruksi dilakukan dengan perencanaan pembersihan lahan. Vendor penyedia mesin dan perlengkapan pelayanan persampahan sudah ditunjuk untuk memulai proses pembelian perangkat pendukung operasional sampah. Dalam rangka penyiapan operasional pelayanan sampah, BWH menyelenggarakan dua studi, (1) Studi lapangan untuk memahami kondisi sarana wilayah pelayanan dan, (2) Studi komposisi sampah untuk memberikan masukan atas uji coba pengelolaan sampah komunal/sekolah dilaksanakan.
- Pengujian Draft Panduan STBM Pilar 4 selesai dilakukan di dua kecamatan dan finalisasi dilakukan dengan memastikan konten terkait pelayanan sampah sesuai dengan desain yang sedang disusun. Rancangan strategi kampanye akan difinalkan bersama Dinas Kesehatan melalui workshop, dan hasil analisa studi formatif terkait perilaku pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga akan menjadi referensi.
- Proses sosialisasi *plastic credit* terus dilakukan, dan komunikasi tentang PKS dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Tembokrejo dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan atas naskah PKS. Sementara itu proses registrasi *plastic credit* untuk Project STOP tetap berjalan, berikut penyiapan berbagai dokumennya.

1.2 Komunikasi

Selain mempromosikan BWH, unit Komunikasi juga mendukung aspek advokasi program melalui kegiatan advokasi media, yang akan disampaikan berkoordinasi dengan Komponen KPP dan Tata Kelola & Kelembagaan. Di periode ini, dimulai diskusi dengan memetakan *influencer* dan media di Banyuwangi, dilanjutkan dengan membangun komunikasi dengan mereka. Di antaranya dengan Banyuwangi Youth Creative Network (BYCN) untuk mengidentifikasi kebutuhan komunikasi dan kampanye, serta memahami dinamika komunitas kreatif di Banyuwangi. Persiapan penyelenggaraan *bootcamp* untuk *influencer* sebagai bagian dari advokasi BWH dilakukan untuk kegiatan bulan Juli nanti.

KEGIATAN KOMPONEN PROGRAM

2.1. Komponen Tata Kelola dan Kelembagaan

Dalam dua bulan periode pelaporan, komponen ini mengembangkan serangkaian kegiatan yang secara umum adalah sebagai berikut:

1. PKS BWH ditandatangani oleh Sekda Kab. Banyuwangi dan Direktur Program Banyuwangi Hijau sebagai panduan untuk pelaksanaan program bagi kedua belah pihak.
2. Penyiapan pembentukan Forum PKP diselenggarakan sebagai salah satu mandat POKJA PKP, yang akan jadi sarana sosialisasi pelayanan persampahan kepada desa-desa.
3. Proses pengajuan anggaran operasional Persampahan tahun 2023 dimulai.
4. Percepatan pengesahan Perda Retribusi Jasa Umum diprioritaskan, mengingat penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Persampahan tergolong baru.
5. Penyusunan Perbup Juklak revisi Perda Restribusi Jasa Umum, draf sudah diajukan tapi belum terproses karena Perda Restribusi Jasa Umum belum direkomendasikan oleh Biro Hukum Propinsi Jatim. Konsultasi dan komunikasi intensif dengan Kemenkeu dan Kemdagri dilakukan hingga diperoleh solusi agar Perda Retribusi dapat diterapkan di akhir 2022.



Foto 1. Rapat Perencanaan Kegiatan POKJA PKP oleh Tim Tata Kelola dan Kelembagaan BWH dengan perwakilan dari Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup.

2. 2. Komponen Sistem Operasional Sampah

Pada Mei-Juni ini, fokus kegiatan komponen ini adalah penyiapan pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan oleh kontraktor terpilih, sembari koordinasi dengan DLH dan para pihak terkait untuk ijin pembangunan TPST terus berjalan. Pemantapan skenario pelayanan persampahan juga dilakukan dengan menyelenggarakan studi observasi lokasi pelayanan sampah di 33 desa lokasi BWH yang telah dirancang pada periode Maret-April yang lalu.

1. Pada bulan Juni, kontraktor pelaksana konstruksi TPST Desa Balak, Songgon telah dipilih. Koordinasi mengonfirmasi desain terus dilakukan dengan DLH untuk memastikan perubahan bisa diakomodasi/ disepakati alternatif solusinya. Bersama kontraktor, tim BWH melaksanakan pengamatan & pengukuran pra- konstruksi.
2. Kontraktor penyedia mesin dan perlengkapan pelayanan persampahan telah terpilih, dan penyusunan kontrak dilakukan dengan memastikan adanya jaminan penyediaan barang sesuai waktu dan spesifikasi yang ditentukan.
3. Terlaksananya studi lapangan wilayah pelayanan sampah dilaksanakan di periode ini bersama tim lapangan dan dikoordinasikan oleh DLH. Hasil studi diharapkan bisa memberikan gambaran nyata tentang kondisi wilayah pelayanan, sehingga perencanaan pelayanan sampah dengan sarana yang ada bisa lebih akurat.
4. Studi komposisi sampah untuk uji coba pengelolaan sampah komunal/sekolah dilakukan untuk memberikan masukan atas desain pengelolaan sampah komunal, khususnya terkait pengelolaan sampah organik di sumbernya.



Foto 2. Studi komposisi sampah di TPS Pesantren Darussalam untuk Uji Coba Pengelolaan Sampah di Pesantren/Sekolah.

2. 3. Komponen Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)

Komponen ini pada periode pelaporan ini, Komponen KPP fokus pada pelaksanaan studi formatif pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, memulai pengembangan pedoman Pilar 4 STBM, dan mulai merancang strategi KPP sekaligus mengelola mobilisasi mitra potensial untuk berkontribusi pada target KPP. Rincian pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Formatif studi Pengelolaan Sampah di Tingkat Rumah Tangga diselenggarakan pada periode pelaporan dan dilanjutkan dengan analisa data. Namun proses analisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, sehingga kontrak konsultan diperpanjang untuk memungkinkan analisa bisa diselesaikan dengan baik. Kemunduran ini berdampak pada proses finalisasi strategi kampanye KPP sebagai upaya mendukung perubahan perilaku masyarakat.
2. Pedoman Pilar 4 STBM Dinas Kesehatan Banyuwangi yang sudah disusun oleh konsultan dicobakan untuk menguji kualitas panduan dan mendapatkan masukan dari praktik penyelenggaraan pemicuan untuk pengelolaan sampah. Konsultan akan menyempurnakan panduan sesuai dengan masukan dengan memperhatikan rencana pelayanan sampah yang akan diterapkan di lokasi BWH. Proses penyelesaian panduan akan dilakukan dengan konsultasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pihak terkait.
3. Komponen ini mendukung unit Komunikasi mulai merencanakan kegiatan advokasi media mendukung kerja advokasi BWH secara keseluruhan dan pada saat yang sama berkontribusi pada upaya perubahan perilaku. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah pelibatan *influencer* lokal lewat kegiatan *bootcamp*.

2. 4. Komponen Inovasi Pendanaan

Komponen Inovasi Pendanaan memiliki dua sub komponen: (1) Eco-sirkular, yang merupakan pengembangan usaha perdagangan sampah untuk berkontribusi pada aliran pendapatan yang stabil bagi pendanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan (2) Inovasi Pendanaan, yang bertujuan membuat percontohan opsi mekanisme pendanaan untuk menyeimbangkan investasi belanja modal bagi infrastruktur pengelolaan sampah.

1. Kegiatan pada inovasi pendanaan di periode ini fokus untuk menyepakati kerjasama penyelenggaraan *plastic credit* yang diformalkan lewat PKS dengan Pemkab Banyuwangi dan Pemdes Tembokrejo. Komunikasi berjalan dimana kemungkinan akan ada perubahan usulan naskah PKS sesuai masukan yang diterima.
2. Sosialisasi tentang proses pendaftaran *plastic credit*, termasuk PKS untuk pendaftaran proyek sesuai standar Verra terus dilakukan. Pembuatan akun Verra untuk pendaftaran Project STOP dimulai.
3. Persiapan pendaftaran *carbon credit* dilakukan, sembari menyusun dokumen proyeknya dan rewiu kebijakan terkait.
4. Proses legal untuk pendirian Eco-Sirkular masih berlanjut, sementara pengenalan inisiatif ini (termasuk inovasi pendanaan) terus dilakukan untuk menggalang dukungan pelaksanaannya. Diantaranya adalah menggalang kemitraan dengan para pengambil sampah daur ulang internasional yang berpotensi untuk mendapatkan kontrak pengambilan sampah jangka panjang.

TANTANGAN & REKOMENDASI

Tantangan

- Proses perizinan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan dan ini berdampak pada dimulainya konstruksi.
- Perubahan regulasi Kemendagri berdampak pada penerapan peraturan bupati tentang retribusi jasa umum, dimana perubahan ini akan berdampak pada penerapan standar tarif untuk persampahan.
- Mundurnya penyelesaian hasil studi formatif akan mengakibatkan kemunduran finalisasi strategi kampanye KPP.
- Kemunduran konstruksi akan diikuti dengan kemunduran waktu dimulainya pelayanan sampah di wilayah program.

Rekomendasi

- Koordinasi dan komunikasi, yang berkontribusi pada kelancaran proses perizinan dilakukan semua pihak terkait agar proses bisa berjalan baik. Sementara itu, pembersihan ladang menjelang konstruksi akan dilakukan sambil menunggu ijin konstruksi diperoleh.
- Pengembangan regulasi daerah untuk mendukung penerapan standar tarif untuk persampahan yang baru merujuk pada peraturan bupati yang sudah diajukan ke Pemprov. Jawa Timur perlu dilakukan, sehingga proses pelayanan sampah yang akan dilakukan bisa sesuai dengan perencanaan,
- Analisa studi formatif yang sudah dihasilkan akan dikonsultasikan dulu kepada Dinkes untuk mendapatkan masukan dan arahan sebelum analisa berlanjut lebih jauh.
- Peninjauan lini masa pelaksanaan program sesuai dengan status pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan dan disepakati semua pihak.



Foto 3. Tim BWH membahas draf PKS pelaksanaan kegiatan plastic credit dengan Pemerintah Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

AGENDA KEGIATAN JULI-AGUSTUS 2022

Berikut rencana kegiatan Program Banyuwangi Hijau periode Juli-Agustus 2022:

- Pembentukan Forum PKP sebagai sarana komunikasi dan koordinasi multipihak untuk mendukung implementasi Program Banyuwangi Hijau, dan menjadi mitra dalam pelaksanaan sosialisasi pelayanan Persampahan di desa-desa target.
- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah untuk menyesuaikan besaran retribusi persampahan sebagaimana panduan dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi solusi belum dapat disahkannya revisi Perda Retribusi Jasa Umum.
- Finalisasi pengajuan anggaran belanja daerah untuk mendukung operasional Persampahan dan kegiatan perubahan perilaku melalui tim anggaran daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Pelaksanaan pelatihan NSPK bagi UPTD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi sebagai panduan dalam menjalankan tata kelola kelembagaan yang baik dan sesuai dengan standar umum pemerintah.
- Koordinasi dengan DLH dan sektor pemerintahan terkait tentang perijinan dan persyaratannya agar konstruksi TPST bisa dimulai sesuai jadwal, yakni pada Juli 2022.
- Menyusun laporan studi observasi tentang wilayah program yang akan menerima pelayanan sampah untuk memastikan rancangan pengumpulan sampah sesuai dengan kondisi riil.
- Menyelesaikan analisa Studi Formatif Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- Mendukung kegiatan *bootcamp* media yang menargetkan media lokal, *influencer*, dan komunitas pemuda di Banyuwangi untuk memperkenalkan BWH dan mengembangkan rencana kampanye kolaboratif.
- Menyelesaikan pedoman pelatihan STBM Pilar 4 sesuai hasil uji coba dan masukan terkait desain teknis TPST yang akan dibangun.
- Menindaklanjuti pembahasan kegiatan para mitra pendukung program untuk dirumuskan lebih lanjut dengan melibatkan komponen-komponen BWH.
- Tim BWH akan menyelesaikan tinjauan hukum tentang pendirian badan hukum Eco-Sirkular, mempersiapkan program percontohan dengan mitra daur ulang terpilih di Surabaya.
- Menyampaikan hasil penelitian tentang lanskap pasokan sampah di Banyuwangi berikut rekomendasinya, serta mempersiapkan bahan pengembangan kapasitas bagi mitra pemasok sampah potensial.
- Pembukaan akun Verra dan pendaftaran Proyek STOP Proyek di bawah Standar *Plastic Credit* Verra. Upaya pemasaran *plastic credit* yang berkelanjutan, mengatur kunjungan lokasi proyek oleh calon pembeli.
- Sosialisasi struktur keuangan campuran bagi sistem pengumpulan dan pemilahan sampah skala besar dengan mitra pemerintah pusat dan daerah.
- Melanjutkan penyiapan berbagai dokumentasi bagi pendaftaran *carbon credit* dan diskusi kemitraan dengan proyek pembangunan dan mitra pemasaran.